

**KONSTRUKSI SOSIAL TOKOH MASYARAKAT MADURA TERHADAP KIAI  
YANG BERPOLITIK PRAKTIS  
(Studi Fenomenologi di Kabupaten Bangkalan Madura)**

**Mohammad Adi**  
**Magister Sosiologi FISIP UNAIR**  
[adiwaru1@gmail.com](mailto:adiwaru1@gmail.com)

**ABSTRACT**

Kiai merupakan suatu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai di Indonesia menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. apalagi Kiai-kiai yang berada di kabupaten Bangkalan merupakan keturunan dari keluarga besar Syaichona Muhammad Kholil Bin Abd.Latif (Penggagas NU-Muhammadiyah).

Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Bangkalan Madura. Berdasarkan studi, ditemukan bahwa, kiai terbukti melakukan sejumlah penafisiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan. Pada umumnya kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan, urusan sosial politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus globalisasi muncul, banyak kiai yang tampak gagap menanggapi.

Hal ini dianalisis dengan menggunakan teori Konstruksi sosial Peter Berger yaitu digerakkan oleh frame pemikiran realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif dimana data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembentukan pola fikir masyarakat mengkonstruksi politik kiai dan faktor- faktor yang melatar belakangi peran sentral kiai dan politik.

*Kata kunci* : konstruksi sosial, masyarakat, Kiai, politik.

## ABSTRACT

Kiai is an elite who has a very respectable position and is influencing the development of Islamic society. Kiai in Indonesia has become one of the strategic elite and is a figure who has a wide and deep knowledge of Islamic teachings. It is not surprising that the kiai then become a source of legitimacy from the various problems that society is developing, especially Kiai-kiai in Bangkalan district are descendants of a large family of Syaichona Muhammad Kholil Bin Abd.Latif (the initiator of NU-Muhammadiyah).

At this point can be seen the strategic roles of kiai in the context of socio-political life in Bangkalan Madura. Based on the study, it was found that the kiai proved to be the number of re-enumerators for the sake of the social conditions it faced, albeit still using the medieval style of thought. in general kiai concentrate on the world of education, social-political relations tend to be abandoned, so that when the flow of globalization emerged, many stuttering kiai responded. It is analyzed by using theory.

Berger's social is referred to by the social framework in society. The research method used is qualitative phenomenology where data with observation and depth interview. The results of this study show the mindset of the people to construct the kiai politics and the factors that underlie the central role of kiai and politics.

**Keywords:** social construction, society, kiai, politics.

Penelitian ini dimaksudkan mengkaji fenomena-fenomena sosial tentang konstruksi sosial Tokoh Masyarakat Madura Terhadap Kiai Yang Berpolitik Praktis di Kabupaten Bangkalan Madura. Konstruksi sosial ini dielaborasi dengan sudut pandang konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann: melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. dan Tindakan Sosial Max Weber Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan naiknya Kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru, akan tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di kepulauan Madura. Oleh karena itu, dari pasca reformasi ini dapat dikatakan keterlibatan Kiai-Kiai di Madura dalam politik praktis mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi melihat dari fenomena perilaku politik Kiai di Kabupaten Bangkalan Madura.

*Pertama*, secara sosiologis kekuatan jaringan Kiai didasarkan pada aspek sosiokultural dan agama, sehingga para santri, wali santri, alumni dan masyarakat di sekitar pesantren mampu menjadi faktor penentu bangunan karismatik seorang Kiai, dan dari karismatik itulah Kiai memiliki modal sosial (*social capital*) untuk berpengaruh dan mempengaruhi tindakan politik masyarakat. *Kedua*, Kiai berperan ganda, yaitu sebagai elit agama, di sisi lain sebagai elit politik. *Ketiga*, pada sisi kritik atas perilaku politik Kiai ialah dibutuhkan penyegaran perilaku politik Kiai yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sebagaimana posisi asal Kiai sebagai elit agama Islam.

Jika dicermati lebih jauh keterlibatan Kiai dalam politik praktis mulai berseberangan dengan masyarakat pendukungnya dan bergeser dari nilai-nilai kultural menjadi nilai ekonomi, dan nilai ekonomi itu sendiri nampaknya lebih dominan dibandingkan dengan nilai yang lain. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kesalehan individual di sini belum sepenuhnya mentransformasi kepada kesalehan sosial dan politik. Dengan demikian,

mengandung maksud bahwa selama ini keterlibatan Kiai Madura dalam politik praktis hampir sama dengan perilaku politik kebanyakan, artinya tidak ada bedanya dengan yang bukan dari Kiai di mana isu kampanye hitam (*black campaign*), isu politik uang (*money politics*), kekerasan, dan tindakan politik yang tidak beretika dan lainnya masih mewarnai dalam panggung politik yang ada di Madura, sehingga dibutuhkan keteladanan Kiai yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam, yang dapat dipercaya, cerdas, jujur, dan menyampaikan sesuatu yang baik dan peduli terhadap kepentingan masyarakat tanpa pandang bulu.

Desentralisasi dan liberalisasi politik membawa konsekuensi munculnya elit lokal sebagai pemain politik. Kiai dan blater sebagai dua elit lokal Bangkalan yang berbeda basis sosial juga tampil dalam panggung politik. Peran dan arena permainan mereka mengalami pergeseran dari aktor desa menjadi aktor kota atau lintas desa, dari sekedar pemain belakang menjadi pemain depan baik dalam ekonomi maupun politik. Fuad Amin menjadi ikon Kiai blater yang mampu menjadi bupati.

Kiai justru terlihat dominan pengaruhnya, sebagaimana terlihat dalam perilakunya yaitu menggunakan semua cara termasuk kekerasan dan kelicikan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Motivasi menjadi bupati lebih karena ingin memperluas lokus dan pengaruh politiknya, bukan pertimbangan amar ma'ruf nahi munkar. Ia melakukan kapitalisasi modal simbolik yang dimilikinya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Klaim sebagai cucu syaikhona kholil, Kiai kharismatik Bangkalan, guru dari sebagian besar Kiai di Jawa dan Madura, termasuk KH, Hasyim Asyari pendiri NU.

Dengan cara itu, para Kiai dan rakyat mayoritas selalu membenarkan semua ucapan dan tindakan politiknya dengan dalih waliyullah, memiliki kharomah dan kesaktian. Sesuatu yang kemudian terbukti bahwa itu semua adalah kedok untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya.

Ketika realitas-empiris telah menunjuk pada kian maraknya para Kiai yang terjun dalam dunia politik, langkah bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembalikan pada Kiai yang bersangkutan. Apakah dalam politik yang syarat dengan intrik dan konflik, para Kiai-politisi itu mampu untuk meminimalisir konflik yang kerap terjadi didalamnya. Satu hal penting yang patut direnungkan atas keterlibatan para pemuka agama dalam dunia politik.

Bilamana seorang Kiai sudah terlalu dekat dengan kekuasaan tanpa bermaksud berburuk sangka yang dikhawatirkan malah menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Sejatinya, politik dapat dijadikan sebagai media. Sehingga agama dapat berfungsi sebagai instrumen bagi kekuasaan. Bagi seorang Kiai *plus* politisi, hendaknya mampu menjalankan kedua profesinya secara ikhlas dan istiqomah. Jika tidak? pengaruh Kiai menjadi tidak bermakna, ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya.

Fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan masih bercokolnya elite-elite lama. Naiknya Tokoh Masyarakat dan Kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru, akan tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di kapulauan Madura. Baik Tokoh Masyarakat maupun Kiai memiliki jaringan sosial yang amat kuat, meski motif yang mereka gunakan amat berbeda. Tokoh Masyarakat lebih menengahkan aspek sosial ekonomi dalam aktor-aktor relasi dalam kehidupan bermasyarakat. sedangkan Kiai lebih pada peran sosial keagamaan.

Santri, wali santri, alumni santri dan masyarakat di sekitar pesantren mampu menjadi faktor penentu bangunan kharismatik seorang Kiai. Sampai saat ini masyarakat Madura masih berkeyakinan bahwa Kiai adalah orang yang dianugrahi kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, sehingga mereka taat dan patuh kepada Kiai yang mampu mendatangkan berkah. Secara otomatis hal itu memunculkan kekuatan otoritatif yang pada zaman dahulu amat determinan. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir kekuasaan

Kiai semakin pudar, seiring dengan semakin maraknya Kiai Madura yang melibatkan diri di dunia politik.

Karena hal ini dinilai oleh masyarakat telah menyalahi koridor dan filosofi orang Madura yang berbunyi *lâkhona lâkhoné khénengâ khénenge*, mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Ini artinya peran ganda Kiai-politik tidak dikehendaki oleh masyarakat Madura pada umumnya, namun mereka harus tetap menjadi tokoh agama yang mempunyai kewenangan tertentu. Hal itu diperkuat dengan slogan *Buppa, Babbu, Guru, Rato* yang secara jelas memberikan garis pemisah dan kewenangan otoritatif terhadap peran sosial elite tertentu. Dengan begitu, jika *juragan* di dunia politik bukanlah hal yang tabu, akan tetapi jika Kiai sudah melibatkan diri di dunia politik, maka kharisma sosial yang dibangun akan semakin pudar dan kekuasaan otoritatif yang dimilikinya juga akan semakin melemah.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial tentang konstruksi sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Kiai Yang Berpolitik Praktis di Kabupaten Bangkalan Madura. Konstruksi sosial ini dielaborasi dengan sudut pandang konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann: melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Sebagaimana dirumuskan dalam fokus kajian, studi ini ingin menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat Bangkalan memaknai politik Kiai dan bagaimana fragmentasi pilihan politik Kiai dipahami, serta faktor-faktor yang mendasari pergeseran pemahaman masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai pengumpulan hingga interpretasi data lapangan, kesimpulan studi ini mengajukan beberapa kesimpulan berkaitan dengan temuan pokok tentang pemahaman tokoh masyarakat terhadap perilaku Kiai dalam dinamika politik lokal.

Dari hasil temuan studi sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat dua varian pandangan masyarakat tentang

makna Kiai yang berpolitik. 1) Sebagian (kecil) mereka setuju dengan keterlibatan Kiai di politik. Alasannya, dengan terlibat di politik akan lebih memudahkan para Kiai untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai pemimpin umat dan pengasuh Pondok Pesantren. Bahkan mereka akan memiliki legitimasi politik untuk menegakkan paham *ahlussunnah wal jama'ah*, sebagai mana yang menjadi pedoman warga *nahdliyin*. 2) Sebagian (besar) mereka tidak setuju dengan keterlibatan Kiai politik. Alasannya, akan mengganggu tugas utamanya.

Hanya saja, baik yang setuju maupun yang tidak, keterlibatan Kiai di politik akan membawa implikasi tersendiri. 1) Kiai mengalami degradasi ketokohan sebagai akibat dari semakin merosotnya karisma yang dimiliki. Otoritas keagamaannya juga semakin terkikis. 2) Dengan Kiai terlibat di politik, perannya sebagai benteng moralitas umat menjadi taruhan. Sebab bagaimanapun, ketika Kiai bersentuhan dengan politik, berarti sedang “bermain-main” dengan kekuasaan. Hal yang demikian, politik akan cenderung hanya dijadikan sebagai medis untuk meraih kekuasaan, dan predikat menjadi teladan umat (*al-uswah al-hasanah*) tentu saja akan tercerabut dari legitimasi sosial masyarakat.

Karena itu, dalam pemahaman tokoh masyarakat Bangkalan, Kiai yang berpolitik tidak semata-mata dimaknai dalam arti orientasi kekuasaan, melainkan politik dalam arti pendidikan politik dan ini bisa dilakukan melalui pesantren. Sebagai catatan penting, karena posisi strategis Kiai adalah mengawal moralitas atau dalam bahasa agamanya amar *ma'ruf nahi munkar*, maka ketika terlibat di politik, justru kecenderungan yang terjadi adalah Kiai mereduksi karisma yang telah dimilikinya. Hal yang demikian inilah, peran strategis Kiai sebagai pemimpin umat sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh umat.

*Kedua*, fragmentasi politik politik Kiai dipahami oleh tokoh masyarakat Bangkalan dalam dua bentuk. 1) Telah terjadi segmentasi kepemimpinan Kiai, terutama kepemimpinan politik Kiai di masyarakat. Kekuasaan politik tidak lagi terpusat pada satu Kiai, melainkan terdistribusi ke seluruh Kiai yang terlibat di politik. Akibatnya, ketika berpihak pada salah

satu kekuatan politik, Kiai dinilai tidak lagi netral. 2) Sebagai akibat langsung dari yang pertama, masyarakat menjadi terpolarisasi. Perpecahan di kalangan umat-pun kadang tidak bisa dihindari karena para Kiai sendiri sibuk dengan kepentingan politiknya, sementara urusan umat menjadi terkesampingkan. Bahkan fragmentasi politik di akar rumput cenderung semakin menguat ketika kepentingan-kepentingan politik dibumbui teks-teks agama sebagai pembenar.

Meski demikian, Kiai yang mengalami fragmentasi pilihan politik, bukan berarti ketaatan mereka terhadap Kiai mengenai masalah keagamaan menjadi hilang sama sekali. Semua Kiai, menurut pandangan mereka, sangat dihormati. Meskipun harus dicatat bahwa penghormatan itu semata-mata karena posisi Kiai sebagai tokoh agama yang memimpin pesantren.

*Ketiga*, keterlibatan Kiai politik melahirkan pergeseran pemahaman di kalangan masyarakat Bangkalan. Perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor. 1) Faktor konsistensi (*istiqamah*) Kiai. Fenomenanya, Kiai sering-untuk mengatakan selalu-berhijrah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Bahkan, ketika berkiprah di eksekutif maupun legislatif, baik secara langsung Kiai terjun ke politik maupun yang didukung oleh Kiai, justru mengecewakan umat karena tindakannya lebih mementingkan kekuasaan daripada menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*. Kesan ini menjadi kredibilitasnya dipertanyakan. 2) Akibat dari hal tersebut, Kiai tidak memiliki keberpihakan kepada umat, justru yang terjadi adalah Kiai cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 3) Karena rasionalitas pemilih. Dalam menentukan pilihan politik, masyarakat tidak semata-mata melihat figur Kiai, melainkan pada aspek visi dan misi serta program yang ditawarkan, baik oleh partai politik maupun seorang calon. Kiai dianggap gagal mengembangkan pendidikan politik dan rekayasa sosial kemasyarakatan melalui pendidikan dakwah.



Kiai yang sebelumnya istiqomah dan sudah cukup sibuk mengurus 'dalam negeri' pesantren dan umat, figur Kiai tiba-tiba menjadi selebriti politik. Ormas Islam, ulama dan Kiai banyak yang tergoda ikut merebut posisi, diperebutkan, bahkan terkadang tampak terseret untuk memasuki gelanggang pertarungan politik yang lebih luas. Mereka berpolitik dan mencemplungkan diri dalam dunia yang penuh manuver dan intrik. Kiai betul-betul menempatkan kharisma dan dukungan umatnya dalam melakukan bargaining politik. Dengan berbagai cara, Kiai mengontrol, menjanjikan bahkan menghukum, lewat fatwa haram dan murtad, umatnya agar mendukung kiprah politik dirinya.

Para Kiai dengan fasih selalu berbasa-basi menghibur diri bahwa berpolitik merupakan bagian dari dakwah serta semata memenuhi tuntutan umat. Sementara umat tidak pernah peduli bahkan cenderung apatis dengan kondisi negara, siapapun yang berkuasa asal harga murah, BBM tidak selalu naik, aman, damai, sejahtera. Seperti halnya masyarakat Bangkalan, ketika pilihan parpol masyarakat mengikuti pilihan Kiai tidak ada sedikitpun perubahan yang dirasakan, bahkan tidak menerima keuntungan apapun dalam kehidupannya.

Kehidupan masih tetap miskin seperti dulu. Lalu apa jaminannya jika Kiai ikut terlibat dalam politik? Memperjuangkan umat? Masyarakat Bangkalan menjawab, tidak siapapun, termasuk Kiai, ketika Kiai berpolitik yang terbersit hanyalah bagaimana memperjuangkan kepentingannya, bagaimana memperoleh kekuasaan, kekayaan dan kesenangan, bagaimana memenuhi ambisi pribadinya.

Digelarnya model pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tentu saja banyak yang teragap dengan perubahan mendadak ini.

Elit agama (Kiai) termasuk kelompok yang relatif belum siap menyikapi terbukanya kesempatan politik di tingkat lokal ini. Tampilnya para kandidat calon Kepala Daerah dalam

arena pilkada langsung mau tidak mau harus menyeret dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial keagamaan adalah lahan potensial yang menjadi lahan rebutan para kandidat Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau pun Gubernur).

Orientasi politik setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pragmatis dan ideologis. Orientasi pragmatis adalah dimana Kiai memosisikan dirinya sebagai “elit lokal” yang mempunyai kekuatan untuk memenangkan hajatan lima tahunan ini. Dengan demikian, ia berhak mendapatkan hadiah atau imbalan setimpal dari apa yang telah dikerjakannya. Namun, orientasi pragmatis seperti tidaklah mudah dilihat dan diteliti. Hal ini dikarenakan, Kiai adalah figur sentral masyarakat, dan jika Kiai melakukan hal-hal yang sedikit saja melenceng dari norma masyarakat, ia akan dijauhi oleh masyarakat. Maka, dalam berpolitik Kiai tidak akan pernah menonjolkan hal tersebut. Namun, banyak Kiai tidak menampik kemungkinan jika ada calon yang memberikan sumbangan dana atas jerih payahnya selama ini.

Orientasi ideologis adalah terjunnya Kiai ke gelanggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, masuknya Kiai ke ranah politik sebagai bagian *amar ma'ruf nahi munkar*. Dan orientasi inilah yang paling menonjol dalam setiap aktifitas Kiai dalam ranah politik.

Hal inilah yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi Kiai, yang seharusnya menjadi salah satu pilar masyarakat, justru ketika aktif berpolitik masyarakat menilai negatif. Bahkan tidak lagi ada pengaruh atau pudar kharisma Kiai, sehingga berakibat negatif pada perilaku memilih masyarakat. Karena pudarnya kharisma, cium tangan yang telah menjadi tradisi untuk mendapatkan barokah, kini jarang bahkan tidak lagi dilakukan, tradisi sowan juga menjadi hilang.

Dengan melihat karakteristik hubungan antara masyarakat dengan Pesantren, Masyarakat dengan Kiai, maka konsepsi Berger tentang konstruksi realitas sosial digunakan dalam kajian ini. Realitas sosial yang dipotret melalui konstruksi sosial ini adalah pemahaman masyarakat tentang perilaku Kiai dalam dinamika politik praktis lokal khususnya pasca orde baru.

Eksternalisasi adalah proses paling awal munculnya konstruksi sosial. pada proses ini, seseorang mengalami momen adaptasi dirinya dengan dunia sosio-kulturnya. proses eksternalisasi yang paling mendasar adalah bagaimana individu masyarakat atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi dengan teks-teks kehidupan, baik yang bersifat abstrak maupun konkrit. sarana yang digunakan dalam momen ini adalah bahasa dan tindakan. bahasa dan tindakan digunakan untuk menyesuaikan dengan dunia di luar dirinya.

Secara konseptual, proses eksternalisasi berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik praktis dapat di gambarkan sebagaimana uraian. *Pertama*, mengacu pada nilai agama dengan menyesuaikan teks-teks suci. ungkapan –ungkapan dalam nilai agama dapat digunakan sebagai pijakan untuk memberikan legitimasi pemahaman masyarakat tentang suatu tindakan politik Kiai. segala gagasan tentang apa yang hendak dikerjakan sesuai dengan perannya sebagai Kiai yang terjun di dunia politik praktis di sesuaikan dengan pedoman perilaku dan akhlaq yang di ajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Penjelasan tentang posisi Kiai yang berpolitik sebagai ulama terdapat dalam surat al-Fathir ayat 28: “ Sesungguhnya yang takut kepada ALLAH di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.” Begitu juga dengan salah satu hadist: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi.” sekalipun dalam batasan yang sulit ditegaskan, tetapi ungkapan menjadi “Kiai yang berpolitik praktis harus memberi manfaat bagi ummat. merupakan ungkapan yang pijakannya di dalam teks suci yang dimaksud.

Standar moral untuk selalu berfikiran dan bertindak demi kesejahteraan rakyat dan demi kebaikan bersama, tentu juga merupakan ajaran yang sudah ada sejak periode Nabi

Muhammad SAW. berbagi rujukan tekstual tentang perilaku dan perkataan dari kesejarahan Nabi. Kemudahan ini karena memang Nabi sudah mengajarkan dan memberi contoh perilaku politik yang baik beliau memerintah di Madinah.

Nilai agama yang menjadi pijakan tindakan politik dan dipakai untuk melegitimasi tindakan tersebut biasanya mengacu dari Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan tatanan sosial politik di Madinah, dalam bentuk piagam Madinah. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Ada dua alasan bagi kehidupan bernegara yang di atur dalam Piagam Madinah, pertama, seluruh pemeluk agama Islam adalah ummat (nation) walaupun mereka berbeda suku. kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Secara strategis piagam ini juga bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosio-religius secara luas. *Kedua*, penyesuaian dengan tradisi lama. dalam perpolitikan di Indonesia, terdapat perilaku yang secara politik telah terkonstruksi sesuai dengan fase orde yang berjalan. ketika pemerintahan orde lama tentu pemahaman masyarakat akan berbeda dengan pemahaman masyarakat orde baru, dan begitu pula dengan pemahaman masyarakat orde reformasi. masing-masing fase ini memiliki keunggulan yang dapat dipakai sebagai rujukan pemahaman. Penyesuaian dengan nilai-nilai lama ini berproses melalui kebiasaan yang masih berjalan pada sebagai anggota masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Dunia pesantren selama ini dipahami sebagai dunia yang terpisah dari politik praktis. sebuah dunia yang berada di balik tembok pesantren yang hanya mendalami berbagai soal agama Islam. tentu keadaan ini menjadi sesuatu yang memerlukan penyesuaian bagi Kiai atau komponen pesantren lainnya ketika ia memasuki dunia politik. Penyesuaian-penyesuaian dengan demikian menjadi hal yang harus dilakukan untuk kelancaran tugas politiknya nanti.

Di dalam moment objektivasi, tindakan sosial seolah-olah berada di luar diri manusia. tindakan sosial Weber ini membentuk jaringan proses pelebagaan atau institusionalisasi. proses objektivasi dalam kaitan ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, Kiai, Pesantren, dan masyarakat adalah tiga entitas yang berbeda. begitu juga tentang masyarakat, pesantren yang menyediakan latar kulturalnya, dan Kiai sebagai figur yang diteladani. Dari persepektif masyarakat, pesantren dan Kiai adalah entitas yang berhadapan dengannya dalam proses objektivasi. Pesantren dan Kiai adalah dunia sosial sebagai tindakan sosial. dialog *intersubjektif* antara masyarakat dengan tindakan sosial di luar dirinya sangat memungkinkan terjadinya makna – makna baru. makna itu sebagai hasil dialog yang terjadi antara dua tindakan yang berakhir dengan integrasi makna-makna yang sebelumnya di anggap sebagai lembaga yang berhadap-hadapan.

Perilaku sesuai dengan tradisi pesantren dan di luarnya di anggap sebagai lembaga-lembaga berlainan dengan pilihan politiknya. tanpa disadari bahwa pesantren dan bukan pesantren itu adalah buatan manusia yang berproses menjadi melalui tahapan konstruksi sosial. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena dunia sosial itu sepenuhnya buatan manusia. Dunia pesantren atau dunia sosial di luar pesantren seringkali tidak disadari, bahwa sebagai sesuatu realitas ia akan selalu berusaha memenangkan dialog antara diri masyarakat dengannya.

Bisa juga terjadi dialog antara tindakan sosial dengan yang ada di luar diri itu terjadi pula dialaog paham *ahlussunnah wall jama'ah* yang menjunjung tinggi nilai-nilai ahklaq dan moralitas dengan paham yang berkembang dalam tindakan sosial politik sebagaimana dipahami dari lingkungan sosialnya. sementra tindakan sosial objektifnya berbanding terbalik dengan yang pada akhirnya menghasilkan makna baru yang merupakan hasil integritas tindakan sosial dan atau hasil penolakan satu realitas.

*Kedua*, pelebagaan atau institusionalisasi yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. di dalam proses pelebagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini masyarakat Bangkalan melakukan sesuatu tentu tidak hanya berdasarkan atas tindakan berpura-pura, tetapi telah menjadi tindakan yang bertujuan, *meaningfull*. mereka tahu sebenarnya tentang manfaat tindakan sosial bagi dirinya sendiri.

*Ketiga*, habituasasi atau pembiasaan yaitu proses ketika tindakan sosial bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. tidak diperlukan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan sosial tersebut telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi berasal dari sistem nilai juga telah menjadi bagian di dalam seluruh mekanisme kehidupannya. dengan demikian, ketika suatu tindakan sosial telah menjadi suatu habitual, maka telah menjadi tindakan sosial yang mekanis yang mesti dilakukan begitu saja.

Internalisasi adalah proses ketika individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan miment penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berda dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunai sosio-kulturalnya. Dalam internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. kesadaran masyarakat akan dirinya dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. Struktur objektif akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan melainkan juga menjadi. misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok. disini manusia akan selalu berada dalam kelompok yang kebanyakan didasarkan atas rasa seidentitas. Kesadaran kolektif akan mudah timbul ketika kelompok manusia itu memiliki identitas yang

sama. jika warga *nadhliyin* berkumpul dengan sesamanya, maka interaksi antar individu akan cenderung berlangsung secara intensif. begitu juga, ketika sesama Kiai berkumpul, maka interaksi antar individu Kiai akan berlangsung intensif. Dalam kolektivitas NU, warga *nadhliyin* Bangkalan dapat berinteraksi secara intensif, tetapi hal ini belum tentu terjadi ketika ia berada dalam suatu kolektivitas dengan identitas yang berlainan dengan identitas kultural NU. itulah sebabnya terdapat penggolongan sosial, misalnya dalam organisasi sosial keagamaan masyarakat dikenal adanya Kiai, intelektual, masyarakat dan sebagainya tergantung pada regulasi yang digunakan. dalam organisasi kultural NU, dikenal adanya kelompok Kiai, santri, masyarakat umum dan lain-lain.

Dalam teori Konstruksi sosial, Berger menekankan adanya hubungan dialektika antara realitas sosial objektif dengan ruang kesadaran subjektif, adapun proses dialektika yang terjadi antara realitas sosial objektif dengan ruang kesadaran subjektif yang ditemukan dalam studi ini adalah berupa dialektika antara realitas sosial Kiai di satu pihak dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menjadi subjek penelitian di pihak lain.

Proses dialektika tersebut tampak adanya pola tertentu, yaitu terjadinya internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi lebih cenderung terjadi tatkala ruang kesadaran subjektif masih berada pada posisi Kiai menjadi elit agama dan pemimpin Pesantren. Dalam internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. dengan peranan Kiai sebagai pengasuh Pesantren dan identitas Kiai sebagai elit agama, masyarakat sebagai anggota-anggota satu struktur melakukan internalisasi. Masyarakat sendiri terstruktur oleh realitas objektif. kesadaran masyarakat Bangkalan akan dirinya dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. struktur objektif akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan melainkan juga menjadi misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.

Sedangkan eskternalisasi lebih cenderung terjadi terutama tatkala Kiai masuk pada wilayah politik praktis. perbedaan masyarakat dengan Kiai dalam hal politik merupakan proses masyarakat Bangkalan membangun dunia sosial (*build social world*)nya sebagai bagian esensial dari kehidupan politik praktis mereka. Eskternalisasi bagi masyarakat Bangkalan adalah menciptakan struktur politik yang stabil yang diperlukan masyarakat, agar Kiai yang dijadikan panutan memiliki kredibilitas di mata masyarakat Bangkalan. struktur itu sendiri adalah sebuah proses produksi bersama (*a collective production*) yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama.

Kendati demikian, segala struktur ini memiliki aturan yang harus di taati. agar penciptaan itu menjadi objektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama yang akan memberi arah, peranan dan makna dalam sebuah totalitas. jadi objektivasi merupakan moment totalitas pemaknaan ketika para aktor sosial secara simultan melakukan eskternalisasi, atau melakukan tindakan sosial yang pada gilirannya membentuk sebuah realitas sosial objektif. Dalam perspektif fenomenologi, realitas objektif yang dimaksud tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah *intersubjektif*.

Tipe tindakan masyarakat untuk menentukan pilihan politik bukan termasuk tindakan yang didorong oleh adanya keinginan untuk mempertahankan tradisi yang sedang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Bangkalan. karena itu, tipe tindakan masyarakat bukan termasuk tipe *tradisional action* yang di gagas oleh Weber, sebab menurut tipe tindakan ini, orang kurang memperhatikan cara efektif dalam mencapai tujuan. Tipe tindakan sosial semacam ini berhubungan dengan orientasi atau dorongan tradisi suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau berdasarkan pada hukum-hukum normatif yang menjadi kesepakatan masyarakat. Mereka menentukan pilihan politik dengan cara tertentu karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat (*khususnya warga nadhliyin*), mengikuti titah Kiai, sesepuh, tokoh masyarakat atau orang tua mereka.



Di samping itu, masyarakat yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan visi misi partai (seorang calon), program partai (seorang calon) serta kapabilitas, akuntabilitas, kredibilitas partai (seorang calon) bukan termasuk pada tipe *affectual* atau *emmotipnal action*, sebab tipe ini merupakan tipe tindakan yang sangat mengedepankan perasaan atau emosi. *Emotion* atau *feeling* ini biasanya melahirkan kebencian yang tinggi atau menghormati seseorang Kiai atau sesuatu secara berlebihan.

Dipandang dari pengertian kedua tipe tindakan sosial tersebut, tindakan masyarakat menentukan pilihan politik dalam studi ini bukan termasuk kedua tipe ini. ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. *Pertama*, masyarakat dengan pertimbangan tertentu “visi misi partai (seorang calon) program partai (seorang calon) serta kapabilitas, akuntabilitas dan kredibilitas partai (seorang calon)” bertundak meninggalkan “fatwa politik” Kiai yang telah menjadi kebiasaan dengan resiko tertentu. *Kedua*, tindakan pilihan politik mereka didasarkan pada pertimbangan *means and ends of action*, seleksi cara.

Data menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Bangkalan memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan pilihan politik, tetapi mereka masih mempertimbangkan “fatwa politik” Kiai yang secara langsung terlibat di dunia politik praktis. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat Bangkalan kepada Kiai karena otoritas keagamaan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang Islam dan juga memiliki Santri serta Pondok Pesantren.

Tipe tindakan sosial masyarakat Bangkalan menentukan pilihan politik ini lebih dekat dengan tipe *wertational action*, karena tindakan mereka lebih mengacu pada nilai, norma atau kekuatan yang ada dalam ajaran agama. Masyarakat Bangkalan tidak menghormati “fata politik” Kiai sebagai pertimbangan menentukan pilihan politik, bukan karena didasari oleh motivasi ingin melanggar tradisi keagamaan, melainkan karena pertimbangan bahwa yang tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagai sosok *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi).

Jadi, tindakan sosial masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan tertentu jika mengacu pada *social action*nya Weber, lebih tepat dikategorikan pada tipe *wertational action*. karena makna yang diberikan kepada figur Kiai sebagai *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi). mengacu pada nilai-nilai atau norma – norma yang ada dalam agama Islam.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa rasionalitas yang di anut oleh masyarakat Bangkalan sesuai dengan konsep Weber adalah *wertational action* atau rasionalitas nilai, yaitu suatu rasionalitas yang berdasarkan pertimbangan nilai, norma yang di yakini benar karena dalam masalah politik mereka memilih tindakan dengan berpedoman pada visi misi partai, program partai, serta kapabilitas, akuntabilitas serta kredibelitasnya. yang lahir dari nilai-nilai agama Islam yang mereka miliki. Apalagi tradisi paham *ahlussunnah wall jama'ah* yang di anut NU, memunculkan sikap relativisme yang menjadi dasar logika munculnya suatu pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak hitam putih.

Merujuk pada tindakan sosial sebagian masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan “fatwa politik” Kiai karena mereka memosisikan Kiai sebagai elit agama sekaligus elit politik, tindakan sosial tersebut dapat dikategorikan pada tindakan atau cara rasional menurut tipe tindakan *rasional instrumental*. Alasan yang bisa dikemukakan adalah tujuan mereka patuh dan taat kepada “fatwa politik” Kiai untuk memperoleh reward agar tidak dikatakan sebagai orang yang “kualat” atau tidak tahu etika menjadi orang NU. jadi rasionalitasnya terorientasi *in short term* dan ini merupakan ciri khas rasionalitas instrumental dengan reward yang langsung dinikmati.

Di sisi lain tindakan sosial sebagai masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan “ fatwa politik” Kiai dilihat dari sudut pandang rasionalitas nilai adalah irrasional dengan alasan bahwa seleksi cara yang dipakai menghasilkan tindakan yang tidak akan mencapai tujuan. karena tindakan yang digunakan sebagai “cara” tidak

sesuai dengan makna yang diberikan kepada figur Kiai sebagai *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi) yang mengacu pada nilai-nilai atau norma – norma yang ada dalam agama Islam.

Karena itu wajar dan logis apabila masyarakat Bangkalan mempertimbangkan “visi misi partai, program partai, serta kapabilitas, akuntabilitas serta kredibelitasnya” dengan tidak menjadikan “ fatwa politik” Kiai sebagai acuan yang sudah menjadi warga *nahdliyin*.

Secara paradigmatik, tindakan sosial masyarakat Bangkalan bisa dikategorikan sesuai dengan paradigma difinisi sosial, karena tindakannya didasarkan pada kesadaran, pertimbangan, penilain, motivasi untuk menentukan pilihan politik, dengan melawan paksaan otoritas “ fatwa politik” Kiai yang telah berlaku dalam masyarakat Bangkalan sebagai struktur sosial dengan konsekuensi menerima sanksi sosial dari masyarakat. Tetapi jika secara makro bahwa Kiai sebagai bagian terpenting dari NU dengan karakteristik dan ciri-ciri ajaran yang dianutnya dapat dikategorikan sebagai fakta sosial, karena Kiai yang terstruktur dalam organisasi NU, maka tindakan sosial masyarakat Bangkalan bisa dikategorikan pada tindakan sosial yang berpradigma fakta sosial. Dalam artian bahwa sejak NU memproklamasikan *khittah* 1926 dan keluar dari PPP telah mempengaruhi tindakan politik warga *nahdliyin*.

Pergerakan politik praktis jangan dijadikan tolak ukur untuk memajukan dan membesarkan pondok pesantrennya karena tergantung sistem pengelolaannya dan figur Kiainya. Peran politik kiai dalam proses politik di partai politik, sebaiknya parpol lebih banyak menerima dan terbuka bagi para kiai, baik kiai yang terjun langsung secara praktis maupun hanya partisipan saja, selama peran kiai itu dalam bentuk masukan, saran, dan pesan moral (*tausiyah*) yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Dengan harapan parpol dan anggota dewannya mempunyai etika politik yang santun yang berimplikasi pada kebijakan publik. Pondok pesantren jangan dijadikan propaganda kepentingan elit politik yang akan berdampak pada ketidak harmonisan di antara Kiai dan Santri.

Fenomena terjadinya konstruksi sosial tokoh masyarakat terhadap Kyai yang berpolitik praktis di kalangan masyarakat Bangkalan, pada dasarnya merupakan mata rantai sejarah pergulatan ideologi antar kelompok kepentingan politik yang secara langsung ataupun tidak langsung telah menyentuh kehidupan Kyai. Kenyataan bahwa Kyai memiliki segmen kepengikutan yang jelas, kini telah diintervensi berbagai kepentingan dengan melibatkan dirinya sebagai sosok yang dapat diperankan untuk memainkan fungsi-fungsi sosial yang sebelumnya tidak pernah disentuhnya. Konsekuensinya, beberapa fungsi sosial keagamaan yang seharusnya diperankan Kyai, sejak beberapa tahun terakhir mulai memudar.

Hal ini terutama disebabkan oleh sekurang-kurangnya dua faktor besar. *Pertama*, secara internal, mulai bergesernya interpretasi teologi Kyai khususnya berkenaan dengan pemikiran dan aktivitas politik. Dan *kedua*, secara ekster-nal, terjadi pula perubahan cara pandang masyarakat terutama berkaitan dengan transendensi kedudukan Kyai di tengah-tengah kehidupan mereka. Seorang Kiai pondok pesantren harus memperkuat posisinya sebagai pimpinan ditengah-tengah masyarakat Bangkalan, supaya daya tawar yang dilahirkan dari kharismanya tidak hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan semata oleh para politisi.